RESPON UMKM PRODUK MAKANAN TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DI KABUPATEN PAMEKASAN

Mukarom Al Mushof¹ dan Achmad Badarus Syamsi²

Abstrak

Banyaknya UMKM di Pamekasan, khususnya produk makanan tidak lepas dari pentingnya jaminan keamanan pangan dari produk tersebut yaitu melalui sertifikasi halal. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum yang di keluarkan pemerintah tentang produk halal di Indonesia. Setelah 6 (enam) tahun disahkan, pemahaman dan ketaatan UMKM terhadap sertifikasi halal masih diragukan, sedangkan kewajiban halal dan sanksi sudah berlaku sejak tahun 2019. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mempertegas Undang-undang sebelumnya yaitu, terkait mempercepat proses dan memberikan biaya gratis bagi UKM (usaha kecil mikro). Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) di beberapa umkm dan Disperindag. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data, dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu dengan digambarkan secara terperinci baru dilakukan analisa dan di ambil kesimpulan, dan peneliti menuliskan kesimpulan dari analisis permasalahan yang diteliti secara induktif. Hasil penelitian menyimpulkan respon pelaku UMKM Produk Makanan memiliki pemahaman berbeda tentang jaminan produk halal dan relatif belum mengetahui Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020. Ketaatan Pelaku (UMKM) Produk Makanan implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 belum menyeluruh di Kabupaten Pamekasan. Serta program sertifikasi halal gratis tidak hanya ada pada Disperindag, namun DinasKop dan UMKM, Dinas Perikanan juga menyediakan fasilitasi gratis mengenai sertifikasi halal.

Kata Kunci: *Produk makanan dan minuman, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jaminan Produk Halal.*

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
mukaromalmushof321@gmail.com

Abstarct

The number of MSMEs in Pamekasan, especially food products, cannot be separated from the importance of guaranteeing food safety from these products, namely through halal certification. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee is a legal certainty issued by the government regarding halal products in Indonesia. After 6 (six) years of ratification, the understanding and adherence of MSMEs to halal certification is still in doubt, while halal obligations and sanctions have been in effect since 2019. Law Number 11 of 2020 which reinforces previous laws, namely, related to speeding up the process and providing fees free for SMEs (small and micro businesses). The research method uses a qualitative approach using field research techniques in several MSMEs and Disperindag. The data collection procedure in this study used the methods of interview, observation, and documentation. Analysis of the data, analyzed descriptively analytically, that is, by describing in detail, the analysis is carried out and conclusions are drawn, and the researcher writes the conclusions from the analysis of the problems studied inductively. The results of the study conclude that the response of MSME actors in Food Products has a different understanding of halal product guarantees and is relatively unfamiliar with Law No. 11 of 2020. The obedience of Food Product Actors (MSMEs) in the implementation of Law No. 33 of 2014 has not been comprehensive in Pamekasan Regency. And the free halal certification program does not only exist at the Industry and Trade Office, but the Cooperative and UMKM Office, the Fisheries Service also provides free facilitation regarding halal certification.

Keywords: Food and beverage products, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Halal Product Guarantee.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan pembangunan UMKM merupakan sebuah penggerak yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diberbagai negara. Pada negara-negara Asia Timur dan Tenggara yang dikenal dengan Newly Industrializing Countries seperti, Singapura, Korea selatan, dan Taiwan memiliki kinerja ekonomi yang baik dengan pertumbuhan PDB yang tinggi diakibatkan karena kinerja UKM di negara-negara tersebut sangat responsif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahnya dalam membangun sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi Ekspor.

Di Indonesia sendiri, dilihat dari jumlah unit usaha yang sudah ada sekarang dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) ada sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini sekitar 8% dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia yakni 59,2 juta, hal itu memberikan kontribusi yang besar untuk Indonesia dengan membuka kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya di daerah perdesaan yang berpendapatan rendah.

Dan dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan UMKM mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan jumlah unit UMKM pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan 4,2 persen dan memberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia selama 3 tahun lebih dari 50%. Dalam hal ini salah satu Kabupaten yang cukup produktif dengan memiliki banyak sekali UMKM adalah Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan merupakan sebuah Kabupaten yang secara geografis terletak di dalam pulau Madura. Dengan memiliki Luas wilayah 79.230 Ha, yang dibagi dalam 13 kecamatan dan 178 desa, serta berada pada Batas wilayah administrasi pemerintahan di sebelah timur adalah Kabupaten Sumenep, di sebelah barat Kabupaten Sampang, di sebelah selatan selat Madura dan di sebelah utara laut Jawa³. Potensi perekonomian yang cukup besar di Kabupaten Pamekasan terbagi dalam tiga wilayah, satuan wilayah pengembangan utara, tengah dan selatan. Dari tiga satuan wilayah pengembangan yang mempunyai potensi industri kecil dan menengah yang paling besar adalah satuan wilayah pengembangan selatan, tepatnya adalah kecamatan Pademawu. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah usaha mikro kecil dan menengah yang paling banyak se-Kabupaten Pamekasan yaitu 1570 buah, dari total jumlah keseluruhan yang ada di Pamekasan sebanyak 1945. Sedangkan jumlah usaha kecil dan menengah produk makanan yang terdaftar mencapai 821 buah. Melihat Produktifitas yang tinggi sudah seharusnya didukung dengan strategi marketing yang bagus, karena banyak sekali pelaku usaha yang dapat memproduksi tetapi kesulitan dalam penjualannya atau kurang mampu untuk menumbuhkan daya tarik terhadap produk yang dimiliki, yaitu salah satunya dengan adanya label halal.

Berdasarkan cultur madura yang merupakan mayoritas masyarakat muslim dengan kekentalan budaya pesantren yang ada, serta adanya tuntunan dalam Islam mengkonsumsi produk halal merupakan sebuah kewajiban, sebagaimana disebutkan di dalam firmanya:

وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al-Baqarah [2]:168)”⁴

Nabi Muhammad saw, mengingatkan agar seorang muslim hanya menjual barang-barang yang halal, baik zatnya, cara proses produksinya, maupun asal-usulnya. Untuk itu sudah semestinya kita mengetahui pentingnya kehalalan suatu produk yang ingin kita konsumsi atau gunakan. Dewasa ini terjaminnya suatu kehalalan produk merupakan hal yang sangat penting, apalagi melihat masa sekarang dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat yang telah melahirkan

berbagai makanan siap saji. Disamping hal itu juga perkembangan IPTEK mempengaruhi cara pengolahan dan pengolaan dan pemanfaatan bahan-bahan baku untuk minuman, makanan, kosmetik maupun obat-obatan dan produk- produk lainnya, yang tidak menutup suatu kemungkinan bahwa suatu akan bercampur dengan yang halal, sehingga sulit untuk di bedakan ketika sudah menjadi suatu produk secara utuh.

Di negara Indonesia telah banyak terjadi kasus-kasus besar terkait kehalalan suatu produk, yang berdampak meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak, diantaranya kasus yang terjadi pada tahun 1998 yang merupakan kasus pertama yang terjadi yaitu isu kandungan lemak babi pada banyak produk pangan. Kemudian disambung lagi pada tahun 2000 juga terjadi kasus MSG Ajinomoto kendati sebelumnya telah dinyatakan halal, tidak sampai berhenti disitu, saja pada tahun 2009 juga terjadi kasus demikian dikagetkan kembali dengan kasus Vaksin Meningitis jamaah haji yang mengandung enzim babi. Dan pada tahun 2015 warga dikagetkan dengan Temuan kandungan babi yang ada di dalam bumbu campur dan bumbu rendam ayam restoran Solaria yang jelas-jelas telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2014, dan kejadian serupa juga terjadi pada produk mie instan asal Korea berdasarkan laporan yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengatakan bahwa pada tahun 2017 pernah mencabut izin edar produk impor berupa mi instan dari Korea dikarenakan proses produksinya yang tidak halal dan menyebabkan tercemarnya produk tersebut dengan DNA babi.

Tabel 1.1
Kasus-kasus Sertifikasi Halal

No	Kasus	Tahun
1.	Isu kandungan lemak babi pada banyak produk pangan.	1998
2.	MSG Ajinomoto kendati sebelumnya telah dinyatakan halal	2000
3.	Kasus Vaksin Meningitis jamaah haji yang mengandung enzim babi.	2009
4.	Kandungan babi yang ada di dalam bumbu campur dan bumbu rendam ayam restoran Solaria yang jelas-jelas telah mendapatkan sertifikat halal pada tahun 2014	2015

5.	Mencabut izin edar produk impor berupa mi instan Korea dikarenakan produksinya yang tidak halal dan menyebabkan tercemarnya produk tersebut dengan DNA babi.	2017
----	--	------

Tabel 1.1, Dengan adanya Kasus-kasus tersebut tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi keyakinan dan kepentingan konsumen muslim di Negeri ini dinilai rendah. Lemahnya jaminan dan pengawasan mengenai produk halal dari Pemerintah dan jelas merugikan konsumen muslim.

Menghadapi problem-problem tersebut, Pelabelan dan sertifikasi produk halal menjadi sangat penting untuk dilakukan para pelaku usaha untuk kenyamanan dan keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut, apalagi mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, untuk itu dengan adanya sertifikasi halal umat muslim dapat dengan mudah memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu juga disisi lain menjadi salah satu poin untuk daya saing diperdagangan internasional.

Adanya Potensi yang besar Di Kabupaten Pamekasan tentunya harus juga didukung oleh jaminan kualitas produk tersebut. Serta ketika melihat dunia bisnis yang semakin bergejolak dan kompetitif yang mendorong para pelaku usaha untuk terus-menerus mencari sesuatu yang sederhana namun bisa menjadi keunggulan produknya. Untuk itu Salah satu standar yang harus dipenuhi oleh para pelaku usah adalah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari adanya prodak Undang-Undang ini lahir sebuah lembaga sebagai perwakilan pemerintah, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang (selanjutnya disebut sebagai BPJPH). Dimana badan ini bertugas untuk melaksanakan jaminan produk halal sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen muslim terkait kehalalan sebuah produk, sertifikasi halal juga dapat berpengaruh dalam meningkatkan nilai jual sebuah produk, sehingga berdaya saing tidak hanya lokal melainkan juga mancanegara, mengingat tren global tentang halal life style. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam hal ini Peran Dinas sebagai fasilitator untuk memfasilitasi

Pelaku Usaha dalam mengurus sertifikasi halal seharusnya menjadi sangatlah penting. Namun pada penerapannya itu sendiri meski pemerintah telah memberikan alokasi dana sertifikasi halal melalui dinas- dinas terkait, namun masih banyak UMKM yang mengaku kesulitan untuk melakukan sertifikasi halal.

Selain itu, bukti nyata bahwa Pemerintah serius dan peduli dalam masalah sertifikasi halal ini direalisasikan dengan adanya UU Omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur tentang sertifikasi halal. Dalam hal ini Pemerintah berharap dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diharapkan bisa mempertegas kewajiban sertifikasi halal yaitu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengatur bahwasannya “setiap produk yang masuk, beredar serta diperdagangkan di dalam wilayah negara Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Dan Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain mempertegas hal tersebut, Undang-Undang ini juga mempermudah Pelaku Usaha dalam mengurus sertifikasi halal dengan mempercepat proses sertifikasi halal dan memberikan biaya gratis bagi UKM (usaha kecil mikro).

KAJIAN LITERATUR

Teori Respon

Respon diambil dari kata response, yang memiliki arti jawaban, balasan atau sebuah tanggapan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) telah dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi dan jawaban.

Respon adalah pemindahan atau pertukaran informasi timbal balik dan mempunyai efek.

Respon merupakan reaksi penolakan atau persetujuan dari diri seseorang setelah menerima pesan. Sedangkan menurut Susanto, respon merupakan sebuah reaksi yang dilakukan seseorang baik terhadap rangsangan maupun perilaku yang dihadirkan oleh rangsangan tersebut. Reaksi sendiri memiliki arti pengiyaan atau penolakan, serta sikap acuh tidak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator oleh pesannya. Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persoalan dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi positif atau negatif terhadap orang-orang, objek atau situasi tertentu. Respon sendiri muncul pada diri manusia melalui suatu reaksi dengan urutan yakni : sementara, ragu-ragu,

dan hati-hati yang dikenal dengan sebuah istilah trial response, kemudian respon tersebut akan terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

Jaminan produk halal ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana hal ini bertujuan agar adanya kepastian hukum. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah mengatur bahwasannya setiap produk yang masuk, beredar serta diperdagangkan di dalam wilayah negara Indonesia wajib bersertifikasi halal. Pada perkembangannya kemudian ada penambahan di dalam pasal 4 ini, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 47 ayat 1 yang mengatakan diantar pasal 4 dan 5 disisipkan pasal 4A yang berbunyi; 1. Untuk Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usah Mikro dan Kecil 2. Pernyataan pelaku usah Mikro Kecil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang diterapkannya oleh BPJPH.38 Sedangkan di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga mengatur terkait “kewajiban halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia” sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 4 yang diberlakukan 5 tahun sejak Undang-Undang itu disahkan.

Hal itu menegaskan bahwa setelah jangka 5 tahun undang-undang itu disahkan, maka para pelaku usaha atau produsen wajib untuk melakukan sertifikasi halal, dan apabila para pelaku usaha tidak menghiraukan hal itu maka akan terkena sanksi hukum. Berikut yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

1. Makanan Halal

Pada dasarnya, seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi, baik yang ada di daratan maupun di lautan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, adalah halal karena memang diperuntukkan bagi manusia. Haram karena membahayakan kehidupan mereka. Sehubungan dengan hal itu, sebagai orang yang beriman kita wajib mengetahui makanan dan minuman yang halal sehingga boleh dikonsumsi, serta yang haram dan wajib dihindari. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT

dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 88, yang berbunyi sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَذُكِّرْتُمْ ۗ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Qs. Al-Maidah [5]:88”

2. Kesehatan

Secara etimologi kesehatan diambil dari dua kaya se dan hat yang merupakan lawam dari sakit. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata sehat diartikan sebagai dalam keadaan baik, artinya segenap bagian-bagian diartikan (bebas dari sakit). hal) sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya) Sehat juga diartikan "keadaan badan segar tidak terasa sakit apapun.

اَلَّذِيْنَ يَتَّقِ فِيْ سَبِيْلِ اِهْلِيْ وَآلِهٖ وَوَلَدٍ تَلْفُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَآءِ التَّهْلُوْكَةِ ۗ وَاَخْسُوْا ۗ اِنَّ اِهْلًا يُّبْـُٔوْا الْمُحْسِنِيْنَ

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Al-Baqarah[2]:195).

3. Proses Sertifikasi Halal

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah sebuah pengakuan terkait kehalalan dari suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁵⁴ Kemudian Untuk mendapatkan sertifikat halal, tentunya harus melalui suatu proses yang telah ditentukan yang biasa disebut dengan proses produk halal. Arti dari proses produk halal ini sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yakni sebuah rangkaian kegiatan untuk menjamin suatu kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyediaan produk.⁵⁵ Dari adanya proses sertifikasi halal ini nantinya akan menghasilkan yang namanya label halal. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Jaminan Produk Halal, yang mana label halal sendiri merupakan suatu tanda untuk melihat terkait kehalalan produk yang beredar dalam masyarakat.

Tinjauan Teori Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu "Hukm" kata jama"anya "Ahkam" yang berarti sebuah putusan (judgement, verdice, decision), ketetapan (provision), perintah (command), Pemerintah (governmet), dan kekuasaan (authority, power.). sedangkan menurut pendapat Vinogradoff hukum merupakan seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku serta perbuatan tertentu dari seseorang dalam hidup bermasyarakat.

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berasal dari kata sadar, yang memiliki arti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Kata menyadari berarti menginsafi, mengetahui, atau merasai. Sedangkan Kesadaran berarti keadaan mengerti, keinsafan, atau hal yang dirasakan dan dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai sebuah keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya. Kesadaran hukum ada 2 (dua) macam yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif.

3. Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan pendapat H.C Keleman bahwa masalah kepatuhan hukum di bedakan dalam tiga proses yaitu compliance, identification, internalization. Pertama yakni compliance, hal ini dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan imbalan serta suatu usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang akan dijatuhkan. selanjutnya yakni identification, identification dapat terjadi apabila suatu tingkat kepatuhan terhadap hukum yang ada bukan karena intrinsiknnya. Selanjutnya, yang terakhir internalization, maksud dari internalization ini adalah bahwa seseorang mematuhi kaidah- kaidah hukum secara intrinsik kepatuhan yang memiliki suatu imbalan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang UMKM), kriteria usaha yang diatur adalah sebagai berikut :

a. Usaha Mikro

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang UMKM usaha mikro dapat diartikan sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Undang-Undang UMKM.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang mana dilakukan oleh subjek hukum yakni perseorangan ataupun badan hukm yang bukan meruoakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang bukan merupakan bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam Undang-Undang UMKM baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian serta tugas pembantuan dan juga sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kejadian secara objektif dengan melakukan cara melakukan pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan) serta dapat diartikan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang berlandaskan pada filsafat positivism.

Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan keadaan subjek penelitian mengenai respon UMKM Produk makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Pamekasan yang kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan teori yang telah ditetapkan.

Informan yang diambil oleh peneliti adalah 7 reponden 6 diantaranya adalah pemilik usaha dan Bidang Pembinaan Industri dan Penanggung Jawab Disperindag Kabupaten Pamekasan untuk memastikan ketatan pemilik UMKM produk makanan di Pamekasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo 11 Tahun 2020 serta memastikan peran dinas terkait, terhadap pelaksanaan sertifikasi halal di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 3.1 Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Salman	Pemilik Usaha Krupuk Mangrove
2	Bapak Muhammad Saleh	Pemilik Tri Crispy
3	Ibuk Khairiyah	Pemilik Usaha Krupuk Udang
4	Ibuk Khusnah	Pemilik Usaha Sosis Lilin

5	Ibuk Nanin Amah	Pemilik Usaha Kripik Talas
6	Bapak Nurul Hidayat	Pemilik Usaha Seblak Ceker Panas
7	Ibu Maria Arisanti	Bidang Pembinaan Industri dan Penanggung jawab Disperindag Kabupaten Pamekasan

Selain data utama tersebut penulis juga menggunakan data penunjang seperti buku, jurnal, jurnal ilmiah, skripsi, tesis yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pamekasan tersebut.

Untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kemudian, disusun secara sistematis berdasarkan proses melalui hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian dianalisis dan ditutup dengan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Respon UMKM Produk Makanan terhadap implementasi Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan

Dari hasil penelitian, melalui metode wawancara yang dilakukan peneliti. Respon Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produk makanan mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk Halal di Pamekasan cukup baik, walaupun pemahaman mereka masih sangat kurang. Namun, meskipun demikian sudah ada beberapa Pelaku Usaha yang menerapkan sistem Jaminan Produk halal pada produknya. Walaupun masih sedikit, jika di bandingkan dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk makanan yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Ketaatan pemilik UMKM Produk makanan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan.

Ketaatan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pamekasan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal juga Masih rendah. Walaupun kewajiban tentang sertifikasi halal pada semua produk yang beredar di Indonesia sudah berlaku sejak

tahun 2019 , akan tetapi belum menunjukan Kemajuan yang signifikan dan masih ada yang belum bersertifikasi halal, terutama pada produk Usaha Mikro Kecil di Pamekasan.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasca di Undang-Undangkannya, UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Kementrian dan Perdagangan telah memiliki peran dalam pengembangan dan juga pembinaan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk dalam hal sertifikasi Halal, sesdengan apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Analisis Respon UMKM Produk Makanan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan respon dalam aspek kognitif, yaitu respon yang berhubungan dengan Pemahaman, pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. Ada 2 (dua) paradigma mengenai pemberlakuan hukum sertifikasi halal dalam menghadapi sebuah proses pergeseran dari hukum yang “lama” menuju hukum yang “baru”. Paradigma pertama adalah *voluntary*, dalam paradigma ini dimana sertifikasi hanya membutuhkan kesadaran dari Pelaku Usaha, sementara lembaga terkait bersifat pasif serta bukan merupakan suatu kewajiban mengikat, namun hanya bersifat suka rela. Paradigma yang ke 2 (dua) adalah *mandatory*, dimana hukum mengenai sertifikasi halal bersifat wajib, dan hendak diijtihadi dengan cara melakukan konstruksi hukum terhadap Undang-Undang jaminan produk halal. Para pelaku Usaha Mikro Keci dan Menengah di Kabupaten Pamekasan pun masih banyak yang memahami bahwa sertifikasi halal bersifat Voluntary (sukarela) untuk masing-masing UMKM. Akan tetapi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pamekasan sangat merespon positif terkait sertifikasi halal, apalagi ketika mendengar biaya gratis untuk pelaku Usaha Mikro Kecil.

Ketaatan pemilik UMKM Produk makanan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan.

Indicator kepatuhan hukum di bedakan dalam tiga proses yaitu compliance, identification, internalization. Di dalam kenyataanya, Achmad Ali memberikan pandangan bahwa berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati sebuah aturan hukum, hanya karena

ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena compliance, dan tidak karena internalization, atau identification. Namun juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinstik yang dianutnya, tetapi juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain. Hal tersebut juga menjadi gambaran bagaimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pamekasan dalam menaati Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan temuan penelitian, sertifikasi halal selama ini sejak ketentuan kewajiban berlaku pada tahun 2019 masih baru menjangkau sebagian kecil Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produk makanan di Pamekasan. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Pamekasan masih belum banyak yang menaati peraturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 jaminan produk halal jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang di pengaruhi faktor Pelaku usaha yang belum mengerti dan juga sosial masyarakat yang juga belum mengetahui aturan tersebut.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk, sesuai dengan tugas, fungsi, dan peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan yang salah satunya bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Pamekasan, Disperindag Pamekasan menjadi wadah bagi UMKM yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya. Dinas Perindustrian Kabupaten Pamekasan membuat program Sertifikasi halal dengan mengeratiskan atau tidak di pungut biaya kepada Industri Kecil Menengah yang mempunyai potensi besar untuk progres kedepannya. Adanya program tersebut juga disesuaikan dengan anggaran yang ada, jadi belum bisa untuk memfasilitasi semua UMKM dengan program tersebut, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan seleksi secara ketat untuk memilih UMKM yang tepat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan juga menjelaskan bahwa program-program tersebut dari APBD Daerah dan APBD provinsi hal itu disalurkan sekarang tidak hanya Dinas Perindustrian dan perdagangan, namun Dinas Koprasi dan UMKM, Dinas Perikanan juga menyediakan fasilitasi gratis mengenai sertifikasi halal.

SIMPULAN

Respon pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Makanan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Cipta Kerja di Kabupaten Pamekasan berbeda-beda antara satu UMKM dengan UMKM yang lainnya. Ada yang memahami secara menyeluruh baik dari aturan lama (sebelum adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014) maupun aturan baru sesudah adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ada yang sekedar mengetahui saja tetapi tidak memahami secara menyeluruh, dan ada juga yang tidak tau sama sekali. Namun pemahaman UMKM terkait peraturan baru yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 masih belum ada yang paham dan menegerti terkait hal itu.

Ketaatan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pamekasan menegenai Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 jaminan produk halal jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja masih belum menyeluruh di UMKM Kabupaten Pamekasan. Ada yang sudah menaati peraturan tersebut yaitu dengan memiliki sertifikasi halal, karena mereka sadar akan kepatuhan terhadap Undang-Undang dan juga mengerti pentingnya sertifikasi halal serta sudah tau dampak dari adanya sertifikasi halal terhadap perkembangan produknya. Namun ada pula yang masih tidak peduli dan tidak mau mendaftarkan karena 94 dianggap produknya sudah laku tanpa adanya sertifikasi halal, dan ada juga yang produknya masih belum membutuhkan sertifikasi halal karena penjualan masih lokal. Akan tetapi, banyak yang belum mendaftarkan diri karena belum mendapat ada sosialisasi tetang kewajiban perintah dari Pemerintah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap Usah Mikro Kecil dan menengah UMKM di Pamekasan sangatlah penting. Disperindag juga telah menjalankan sosialisasi dan program sertifikasi halal gratis tanpa dipungut biaya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil yang memiliki potensi untuk berkembang. Hal itu sudah menjadi tugas dan fungsi poko Disperindag untuk melakukan pengawasan dan pembinaan pelaku UMKM dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2012). *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Afronyati, Lies, "analisis ekonomi politik sertifikasi halal oleh majelis ulama Indonesia", *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, Vol 18, No 1, 2014.
- Arikunto, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Bintan Dzumirroh A Nurhasanah, , *SYAR'IE*, Vol.3, No2, 2020.
- Charity Lim May, "Halal Products Guarantee In Indonesia", *Jurnal Legislasi*

Mukarom Al Mushof, Achmad Badarus Syamsi: Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan

Indonesia, Vol. 14 NO. 01, 2017.

- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu.
- Dharu Triasih, Doddy Kridasaksana, B.Rini Heryanti, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, No 2, 2016.
- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum sebagai wujud kesadaran masyarakat, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014.
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2017. Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2016
- Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, cet. ke-2 Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- <https://bappeda.jatimprov.go.id>.
- <https://disperindag.Pamekasankab.go.id>.
- <https://disperindag.jatimprov.go.id>.
- <https://docplayer.info> <https://news.detik.com>.
- <https://www.kominfo.go.id>.
- <https://www.halalmui.org>.
- <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, 2016.
- Kamus Bahasa Indonesia / tim penyusun, *kamus pusat bahasa*, Jakarta: Kartib Bayu, Yuyus Suryana, "Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik *Wirausaha Sukses*", Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Khamumudin, "*Fiqh Kesehatan Inspirasi Meraih Hidup Sehat Secara Kaffah*",
- M. Hamdan Rasyid, "peranan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Menjamin Kehalalan Makanan dan Minuman", *Jurnal Syariah* 3, 2015, hal 8.
- Manan, A.(2006). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mc. Quail, D. (1987). *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Erlangga.
- Moeleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muslan, A. (2009). *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Najiyah, Zumroh, "*Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang jaminan produk halal tahun 2014*" Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Ni'mah, Lutfiana, Agnes, "*Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal pada produk makanan industri kecil menengah (IKM) di Tulungagung*", Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.

Mukarom Al Mushof, Achmad Badarus Syamsi: Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan

- Nugrahani Farida, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Solo*: Cakra Books, 2014.
- Nurhasanah Saniatun, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol VIII, No 3, 2017.
- Permendag Nomor 96 Tahun 2017
- Pos Malang Redaksi Tim, *Ukm Si Kecil Menggeliat Di Tengah Badai*, HM Sampoerna dan Malang Post:Malang,2008.
- Prastowo, Andi, *Menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif*, DIVA Press: Jogjakarta,2010.
- Pusat Bahasa, 2008
- Putera, Bhairawa, Prakoso, "*Iptek Dan Inovasi: Kunci Meretas Jalan Menuju Kemandirian Bangsa*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Putra Agus Adam Panji, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam", *Amwaluna*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No.1 Januari 2017 Hal. 150-165.
- Qomaro, Widya, Galuh, dkk. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan", *Jurnal Pangabdhi* , volume 5 No. 2, Oktober 2019.
- Rahmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Rusdiana, "*Kewirausahaan Teori Dan Praktek*", Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Sari, Norma, *Tujuan Umum dalam Praturan PerUndang-Undangan di Indonesia*, UAD PRESS:Yogyakarta,2021.
- Septiawan, Ade, M, "*Kewenangan LPPOM MUI dalam penentuan sertifikasi halal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*" Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Sodik, A. & Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. cet. ke-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta ; Rajawali Pers, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah- Masalah Sosial*. Bandung: Alumni, 1982.
- Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1986.
- Soetjipto Noer, "*Ketahanan Umkm Jawa Timur Melintasi Pandemic Covid- 19*", Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*,ALFABETA: Bandung, 2015.
- Sule Tisnawati Ernie, "*Manajemen Bisnis Syariah*", Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Sumadyo, Samsu, *Penelitian tindakan kelas*, graha ilmu:Yogyakarta,2013.

Mukarom Al Mushof, Achmad Badarus Syamsi: Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan

Sumarni, Murti, Salamah Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis*, C.V ANDI OFFSET:Yogyakarta, 2006.

Suprayogo, Imam, "Metodologi Penelitian Sosial-Agama", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

Supriantni, Renny, "Eksistensi Dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia Dalam Penerapan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan Di Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*: Vol.III, No, 2, 2011.

Susanto, Dasar-Dasar Manajemen Edisi Baru Jakarta: Miswa, 1997. Tabunan, Tulus T.H, *Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta, 2002.

Syaiful Amri, M. Jamil, Ardiansyah, "Analisis Yuridis Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Ilmiah UIN Sumatera Utara*, 2016.

Tabunan, Tulus T.H, *Ukm Di Indonesia*, Gahlia Indonesia: Bogor, 2009. Trim, Bambang, "*Business Wisdom Of Muhammad Saw*", Bandung: Cv Multi Trust Creative Service, 2008.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Uno, Sandiago," Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi", *Jurnal Halal*, No 91 Th. XIV Tahun 2011, (Jakarta: LPPOM MUI).

Winarni, Komunikasi Massa, Malang: UMM Press, 2003

Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Yunus, Muh," *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*", Malang Press: Malang, 2008.

Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zamakhsyari bin Hasballah Thalib Hasballah Thalib, "Al-Quran Dan Kesehatan Jiwa", Medan: Wal Ashri Publishing, 2015.